



DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
KOTA BATAM
2021





DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
KOTA BATAM
2021

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KOTA BATAM 2021

ISBN: 978-623-7857-38-9

No. Publikasi: 21710.2128

Katalog: 3205014.2171

Ukuran Buku: 14.8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii+60 halaman

Naskah:

BPS Kota Batam

Penyunting:

BPS Kota Batam

Desain kover oleh:

BPS Kota Batam

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pencetak:

PT. Ripos Bintana Press

Sumber ilustrasi:

Freepik.com, https://batampos.co.id/wp-content/uploads/2018/09/Ruli_Dalil-Harahap1.jpg

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rahmad Iswanto SST., M.Si

Penanggung Jawab:

Resa Surya Utama SST, M.E

Penyunting:

Resa Surya Utama SST, M.E

Penulis Naskah:

Evawane Fahma Kusumawardani S.Tr.Stat

Infografis:

Evawane Fahma Kusumawardani S.Tr.Stat

<https://batankota.ac.id>

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan informatif. Dengan tersedianya data dan informasi kemiskinan, diharapkan dapat mendeteksi faktor-faktor yang terkait dengan masalah kemiskinan itu sendiri.

Publikasi ini menjelaskan metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dan analisis tentang penduduk/rumah tangga miskin. Analisis yang dilakukan meliputi perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Batam, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin. Data profil rumah tangga miskin yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2020. Namun, pada bab 3 ditampilkan kondisi terkini yaitu kondisi umum kemiskinan Tahun 2021.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Batam, Desember 2021

Badan Pusat Statistik Kota Batam
Kepala,

Rahmad Iswanto SST., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB 2 Metodologi	7
2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan	9
2.2. Indikator Kemiskinan	13
2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	14
BAB 3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	19
3.1. Garis Kemiskinan Kota Batam	21
3.2. Penduduk Miskin Kota Batam	22
3.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	24
3.4. Gini Rasio	25
BAB 4 Profil Rumah Tangga Miskin	27
4.1. Karakteristik Sosial Demografi	30
4.2. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	32
4.3. Karakteristik Sosial Ketenagakerjaan	40
4.4. Karakteristik Sosial Pendidikan	43
BAB 5 Penutup	45
Inforgrafis	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin Kota Batam, Maret 2020	30
Tabel 4.2.	Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Luas Lantai Per Kapita, Maret 2020	39
Tabel 4.3.	Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020	42
Tabel 4.4.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, Maret 2020	43
Tabel 4.5.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, Maret 2020	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Koefisien Gini menurut Kurva Lorenz	15
Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia, Maret 2011–Maret 2021	21
Gambar 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021.....	23
Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021.....	25
Gambar 3.4. Gini Ratio Kota Batam Tahun 2011-2020	26
Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas Kota Batam, Maret 2020	33
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas Kota Batam, Maret 2020	34
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Penerangan Kota Batam, Maret 2020	35
Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum Kota Batam, Maret 2020	36
Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Kota Batam, Maret 2020	37
Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Kota Batam, Maret 2020	38
Gambar 4.7. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Kota Batam, Maret 2020	39
Gambar 4.8. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020	41
Gambar 4.9. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020	42

1 PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Salah satu aspek penting untuk pendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang tepat dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu data kemiskinan yang akurat juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Pada tahun 2015 hingga saat ini BPS melaksanakan Susenas setiap semester yaitu pada bulan Maret dan September, sehingga BPS mampu menyajikan data kemiskinan dua kali di setiap tahunnya untuk level

nasional dan provinsi. Sedangkan, untuk level kabupaten/kota, angka kemiskinan dihasilkan satu kali setiap tahunnya berdasarkan Susenas bulan Maret. Buku ini akan meyajikan dan membahas kemiskinan pada level kabupaten/kota saja.

1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan Buku Data dan Informasi Kemiskinan Kota Batam adalah:

1. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Batam tahun 2020 dan perkembangannya;
2. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kota Batam pada tahun 2020;
3. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Kota Batam tahun 2020.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan ini mencakup tingkat kemiskinan di Kota Batam pada tahun 2020, karakteristik rumah tangga miskin, distribusi, dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan buku data dan informasi kemiskinan.

Bab 2, menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran

kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan.

Bab 3, membahas tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Batam, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Batam.

Bab 4, membahas tentang profil rumah tangga miskin Kota Batam tahun 2020 berkaitan dengan karakteristik pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan.

<https://batamkota.bps.go.id>

2 METODOLOGI



BAB II METODOLOGI

2.1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

a. KONSEP

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. SUMBER DATA

Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Konsumsi/Pengeluaran dan Kor.

c. METODE

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: **GK = GKM + GKNM**.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-adian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

d. TEKNIK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

- V_{jkp} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.
- j = daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

- K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.
- HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM) .
- j = daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = provinsi ke-p.

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non- makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKDD 2004), yang

dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{j,p} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

- GKNM_{j,p} = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_{kj} = rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).
- k = jenis komoditi non-makanan terpilih.
- J = daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

- %PM_k = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- PM_k = Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota k.
- P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana:

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

2.2 INDIKATOR KEMISKINAN

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* ($HCI = P_0$), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing pendudukmiskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P \propto = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

di mana:

- | | |
|----------|--|
| α | = 0, 1, 2 |
| z | = Garis kemiskinan |
| y_i | = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, ..., q), $y_i < z$ |
| q | = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan |
| n | = Jumlah penduduk |

- Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0),
- jika $\alpha=1$, diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1),
- jika $\alpha=2$, disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2).

2.3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan

digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

a. KOEFISIEN GINI (GINI RATIO)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i * (F c_i + F c_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

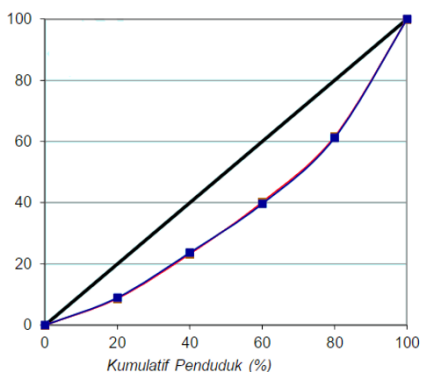
Fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-*i*

Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-*i*

Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(*i-1*)

Gambar 2.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Kumulatif Pengeluaran (%)



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu

variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi, hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik, seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. UKURAN BANK DUNIA

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk

dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut.

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan
- Seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

3 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN & KETIMPANGAN PENGELUARAN



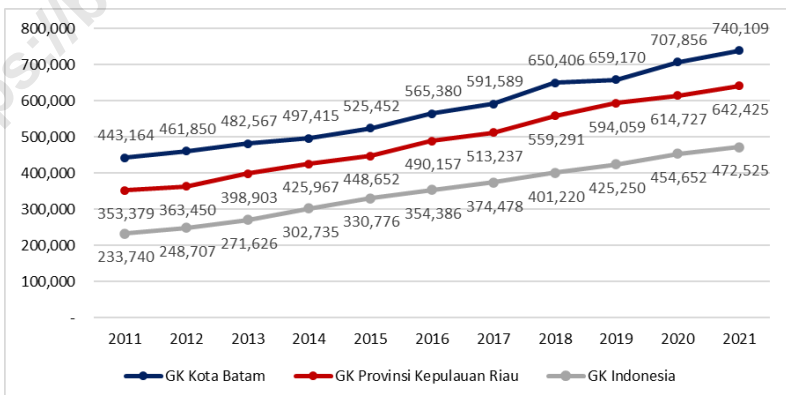
BAB III

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

3.1 GARIS KEMISKINAN KOTA BATAM

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam terminologi umum, hal tersebut didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia, Maret 2011–Maret 2021



Sumber: Susenas Maret 2011-Maret 2021

Perkembangan garis kemiskinan periode Maret 2011-Maret 2021 menunjukkan tren yang selalu meningkat. Garis kemiskinan per kapita

adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum per bulan yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis kemiskinan Maret 2011 hanya Rp443.164,-/kapita/bulan, sedangkan pada Maret 2021 garis kemiskinan mencapai Rp740.109,-/kapita/bulan (meningkat 67 persen dibandingkan kondisi Maret 2011). Berdasarkan Gambar 3.1, terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan garis kemiskinan Indonesia.

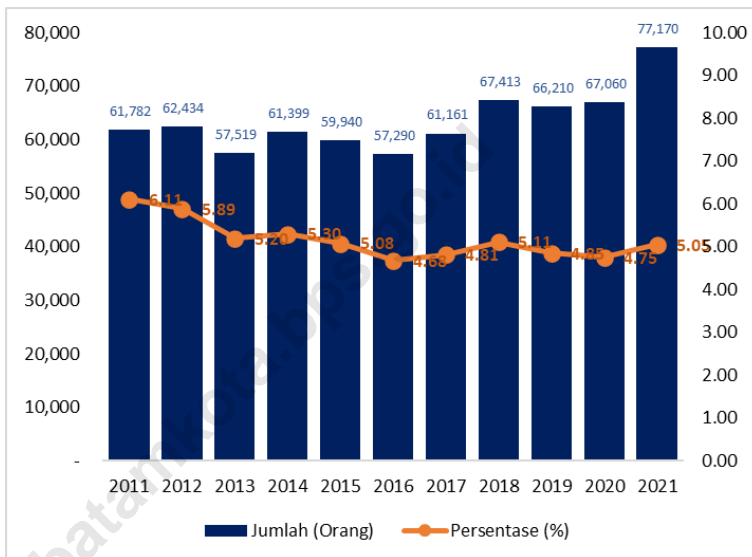
3.2 PENDUDUK MISKIN KOTA BATAM

Mengacu pada definisi Garis Kemiskinan pada sub bab sebelumnya, maka penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Secara umum, pada periode Maret 2011–Maret 2021, persentase penduduk miskin di Kota Batam mengalami penurunan, perkecualian pada Maret 2014, Maret 2018, dan Maret 2021. Kenaikan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2014 dan Maret 2018 dipicu oleh melemahnya kondisi perekonomian Kota Batam pada dua periode tersebut. Sementara itu, kenaikan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun pada periode Maret 2011-Maret 2021, namun potret kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami tren yang meningkat pada periode tersebut. hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Perkembangan tingkat

kemiskinan Maret 2011 sampai dengan Maret 2021 disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021



Sumber: Susenas Maret 2011-Maret 2021

Peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan sangat bergantung pada program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, terutama dengan perubahan harga pada bahan makanan. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa bahan makanan pokok mampu menekan angka kemiskinan. Namun demikian, bantuan berupa bantuan pangan tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan, perlu bantuan dalam bentuk lain sehingga penduduk miskin dapat sepenuhnya keluar dari kemiskinan. Adapun bantuan dalam bidang

kesehatan dan pendidikan diharapkan juga mampu menanggulangi kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

3.3 INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN

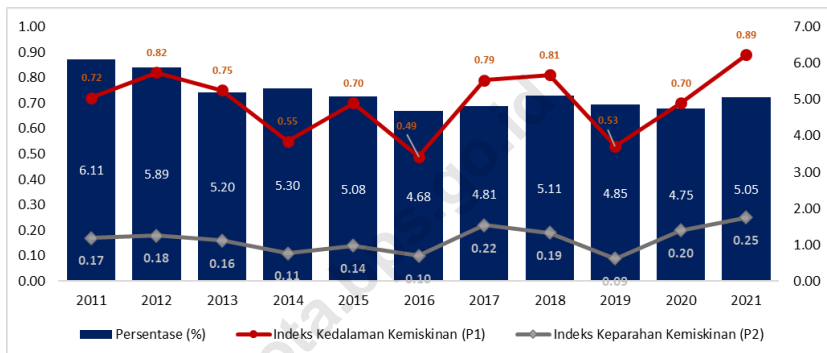
Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak hanya berfokus pada berapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Lebih daripada itu, penanggulangan kemiskinan harus meliputi beberapa aspek, seperti seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan serta distribusi pengeluaran antara penduduk miskin.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada tiga ukuran kemiskinan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Ukuran tersebut adalah poverty incidence (P0) merupakan ukuran yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Angka ini memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. Poverty Gap (P1), mengukur seberapa jauh jurang/Gap pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan, akan tetapi tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin serta tidak terdeteksi distribusi antar penduduk miskin yang timpang. Ukuran terakhir adalah poverty severity (P2), mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Kelemahan dari P2 adalah tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin.

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, ketiga ukuran kemiskinan ini harus disertakan. Dengan mempertimbangkan ketiga ukuran tersebut,

diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh aspek sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batam, Maret 2011–Maret 2021



Sumber: Susenas Maret 2011-Maret 2021

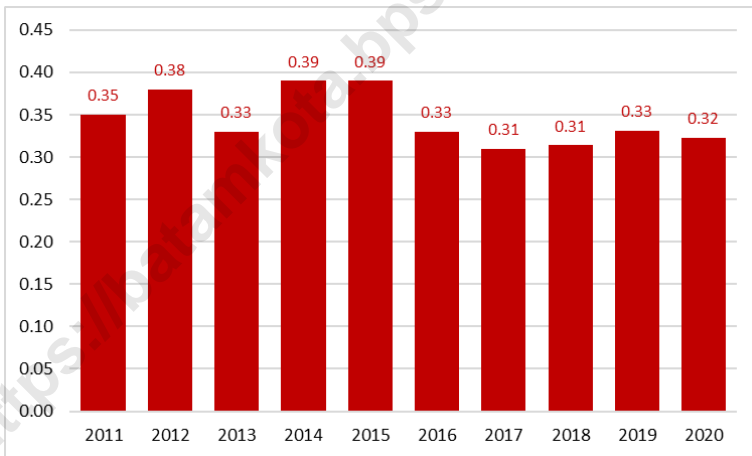
Pada periode Maret 2011 - Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cukup berfluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2011 adalah 0,72 dan pada Maret 2021 menjadi kenaikan menjadi 0,89. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,17 pada Maret 2011 menjadi 0,25 pada Maret 2021. Fluktuasi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) serta perbandingan dengan persentase penduduk miskin Kota Batam periode Maret 2011 – Maret 2021 dapat terlihat pada Gambar 3.3.

3.4 GINI RASIO

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah Gini Rasio. Dengan dihasilkannya angka Gini Rasio, akan

terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai Gini Rasio selalu bekisar antara 0 dan 1. Jika nilai Gini Rasio di bawah 0,3, dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai Gini Rasio, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5. Gini Ratio Kota Batam bergerak fruktuatif selama tahun 2011-2020. Seperti pada gambar 3.4.

Gambar 3.4. Gini Ratio Kota Batam Tahun 2011-2020



Sumber: Susenas Maret 2011-Maret 2020

4 PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN



BAB IV

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

- Disamping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.
- Profil kemiskinan diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani gurem bisa berakar dari asetnya yang justru terlalu kecil, atau dari persoalan alam dan infrastruktur yang tidak mendukung, dan sebagainya. Akar permasalahan pedagang kecil, pengrajin kecil, buruh bangunan, pengangguran, buruh musiman, dan sebagainya bisa berbeda.
- Profil kemiskinan juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat melalui sasaran wilayah geografis.
- Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Profil kemiskinan semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan.

4.1 KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang diukur dari indikator rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga.

Tabel 4.1. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin Kota Batam, Maret 2020

<i>Karakteristik Rumah Tangga</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata ART	5,10	4,24	4,99
% Jenis Kelamin Kepala RT	88,01	11,99	100
Rata-rata Umur KRT (tahun)	46,88	60,79	48,54
Rata-rata Lama Sekolah KRT (tahun)	8,40	5,06	8,12

Sumber: Susenas Maret 2020

Penelitian tentang hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Dengan jumlah anggota rumah tangga yang cenderung banyak maka akan berdampak pada rendahnya kemampuan rumah tangga tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangganya. Dengan demikian, jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Dari Tabel 4.1, terlihat secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Kota Batam pada tahun 2020 adalah 4,99 orang. Artinya dalam satu rumah tangga secara umum terdiri dari 4-5 anggota rumah tangga. Selanjutnya, apabila dilihat dari distribusi persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2020 mencapai 11,99 persen, sedangkan laki-laki sebesar 88,01 persen. Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan karakteristik yang cukup penting, mengingat secara umum akses perempuan yang telah/pernah menikah untuk mendapat pekerjaan, terutama sektor formal sangat terbatas. Di samping itu, adanya dua peran yang dijalankan oleh kepala rumah tangga perempuan, yaitu mengurus rumah tangga dan bekerja, menyebabkan waktu yang digunakan untuk memperoleh pendapatan menjadi lebih terbatas.

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat apakah kepala rumah tangga miskin masih dalam kategori umur yang produktif. Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 48,54 tahun. Rata-rata umur kepala rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki menunjukkan angka sebesar 46,88 tahun,

sedangkan rata-rata umur kepala rumah tangga perempuan adalah 60,79 tahun.

Hal menarik lainnya yang bisa diamati dari karakteristik demografi rumah tangga miskin adalah rata-rata lama sekolah. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin adalah 8,12. Artinya secara total, rumah tangga miskin kepala rumah tangganya hanya mampu menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama saja. Bahkan pada rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya adalah perempuan, rata-rata lama sekolahnya hanya mencapai 5,06 yang berarti rata-rata kepala rumah tangga miskin yang berjenis kelamin perempuan tidak mampu menamatkan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah pertama.

4.2 KARAKTERISTIK TEMPAT TINGGAL (PERUMAHAN)

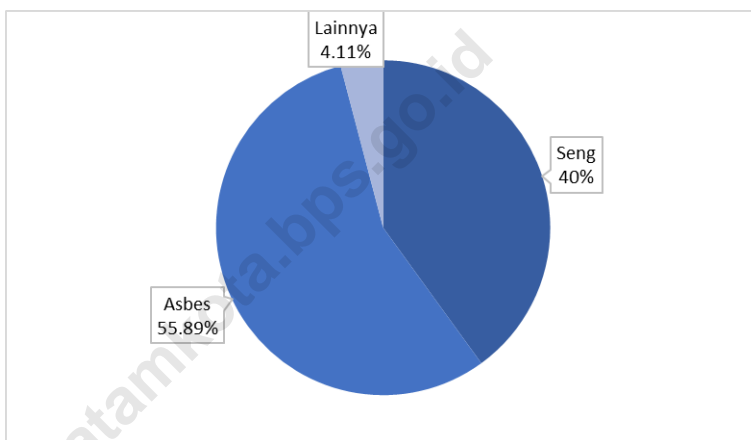
Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan apakah suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak. Selain karakteristik demografi, karakteristik tempat tinggal atau perumahan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan rumah tangga miskin. Meskipun indikator tersebut tidak selalu sama di setiap daerah, namun mampu menjadi deteksi awal dari penentuan rumah tangga miskin.

4.2.1 JENIS ATAP

Gambar 4.1 menyajikan profil rumah tangga miskin menurut jenis atap rumah terluas. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jenis atap seng dan atap asbes merupakan salah satu profil rumah tangga miskin mengingat persentase rumah tangga miskin yang menggunakan

kedua jenis atap tersebut jauh lebih tinggi dibanding persentase jenis atap terluas yang lainnya. Persentase rumah tangga miskin yang memiliki rumah dengan atap asbes sebesar 55,89 persen, atap seng sebesar 40 persen, sedangkan untuk atap lainnya sebesar 4,11 persen.

Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas Kota Batam, Maret 2020



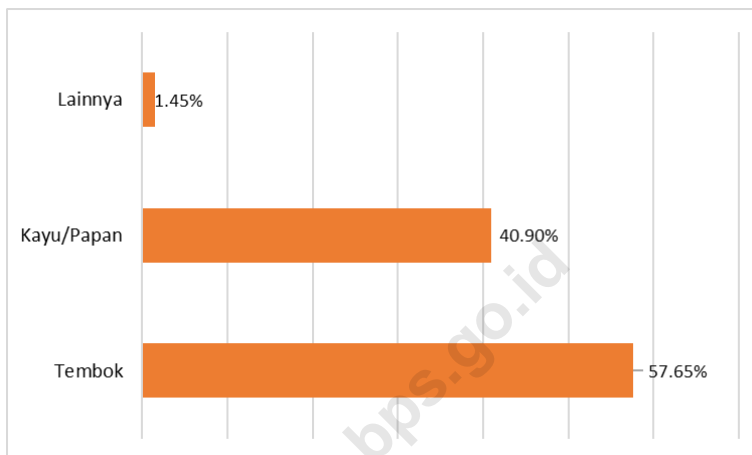
*Lainnya termasuk beton, genteng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia

Sumber: Susenas Maret 2020

4.2.2 JENIS DINDING

Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Gambar 4.2 terlihat bahwa 57,65 persen rumah tangga miskin memiliki rumah yang berdinding tembok. Sedangkan 40,90 persen adalah rumah tangga miskin yang rumahnya berdinding kayu dan 1,45 persen memiliki jenis dinding lainnya termasuk plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, batang kayu, bambu.

Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas Kota Batam, Maret 2020



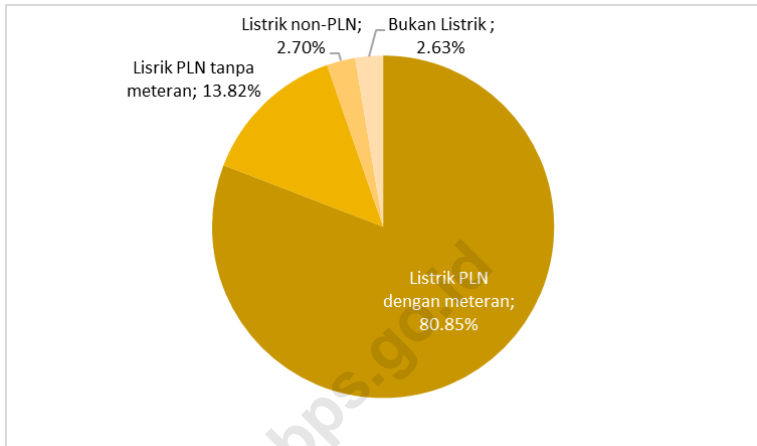
*Lainnya termasuk plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, batang kayu, bambu

Sumber: Susenas Maret 2020

4.2.3 JENIS PENERANGAN

Indikator perumahan lainnya adalah jenis penerangan rumah yang dibedakan atas listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, listrik Non PLN, dan bukan listrik. Gambar 4.3 menyajikan rumah tangga miskin menurut empat jenis penerangan. 80,85 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan listrik PLN dengan meteran, 13,82 persen tanpa meteran untuk penerangan di rumahnya. Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN sebesar 2,70 persen dan masih ada 2,63 persen rumah tangga miskin yang menggunakan penerangan bukan listrik.

Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Penerangan Kota Batam, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

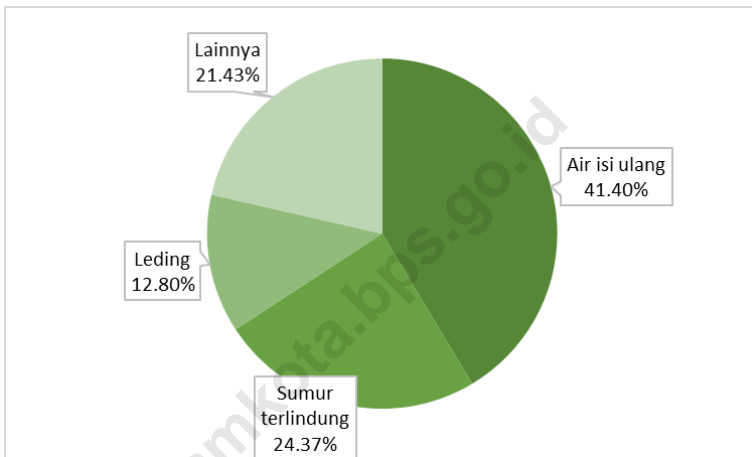
4.2.4 SUMBER AIR MINUM

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikut didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan bermerk/air isi ulang/leding/PAM/sumur terlindung/mata air/air permukaan/air hujan/lainnya. Ketidakterediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Berdasarkan Gambar 4.4 menurut sumber air minum yang digunakan, rumah tangga miskin paling banyak menggunakan air yang berasal dari air isi ulang, yaitu sebesar 41,40 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur terlindung dan leding, yaitu masing-masing sebesar 24,37 persen dan 12,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas air

bersih sebagai sumber air minum pada rumah tangga miskin sudah cukup baik.

Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum Kota Batam, Maret 2020



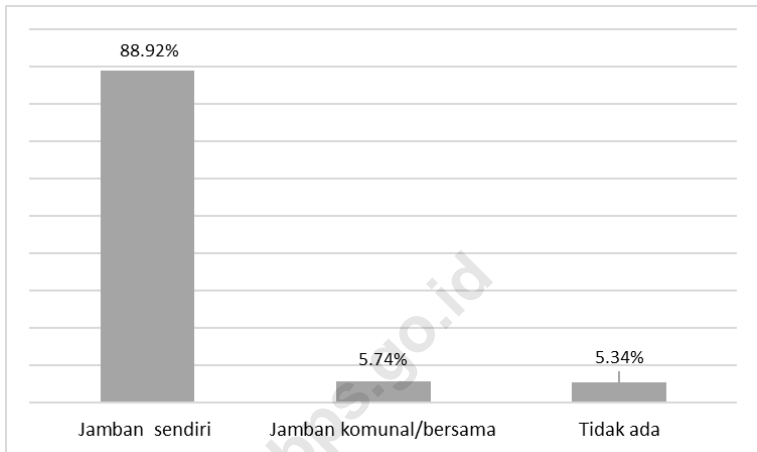
*Lainnya termasuk air kemasan bermerk, sumur bor/pompa, sumur tak terlindung, mata air, air permukaan, air hujan

Sumber: Susenas Maret 2020

4.2.5 PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR

Ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau jamban menjadi salah satu indikator fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting, di mana dibedakan atas jamban sendiri (digunakan hanya ART sendiri), jamban komunal/bersama, dan tidak ada fasilitas.

Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Kota Batam, Maret 2020



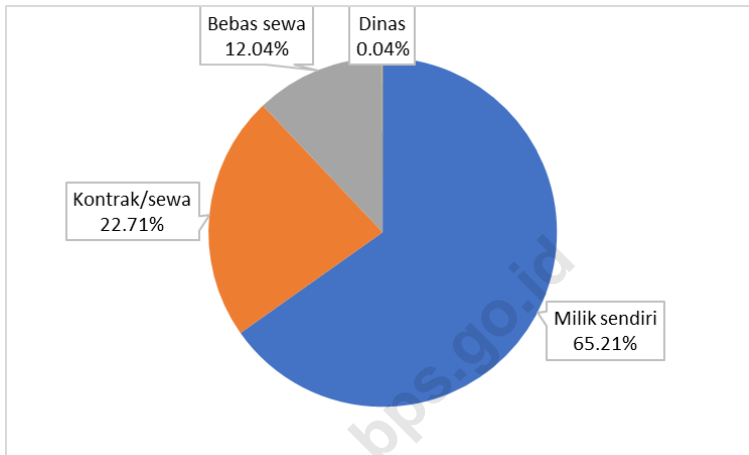
Sumber: Susenas Maret 2020

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 88,92 persen dan yang menggunakan jamban komunal/bersama sebesar 5,74 persen. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban, yaitu sebesar 5,34 persen.

4.2.6 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah pada Gambar 4.6, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 65,21 persen dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 22,71 persen.

Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Kota Batam, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

4.2.7 LUAS LANTAI

Salah satu indikator perumahan yang diinginkan banyak orang adalah keleluasaan pribadi (privacy) yang salah satunya dapat tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Salah satu acuan dari Kementerian Kesehatan menentukan bahwa suatu rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai rumah per kapitanya minimal $8 m^2$ (BPS, 2001). Tabel 4.2. menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai perkapita.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai rumah per kapita yang disajikan pada Tabel 4.2., tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita kurang atau sama dengan $8 m^2$ tercatat sebesar 33,22 persen. Sementara itu, yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita

lebih dari 8-15 m² tercatat sebesar 40,32 persen, dan hanya sebesar 26,46 persen yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 15 m².

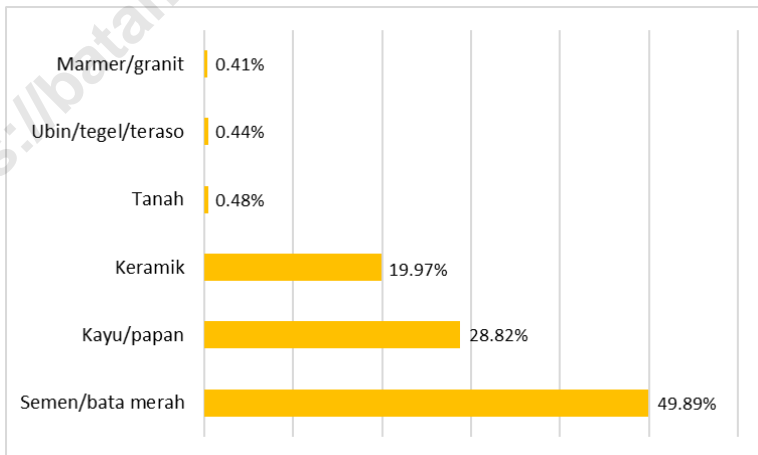
Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Luas Lantai Per Kapita, Maret 2020

<i>Luas Lantai Per Kapita (m²)</i>	<i>Rumah Tangga Miskin (%)</i>
(1)	(2)
<= 8m²	33.22
8m² <luas<=15m²	40.32
> 15m²	26.46

Sumber: Susenas Maret 2020

4.2.8 JENIS LANTAI

Gambar 4.7. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai Kota Batam, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Gambar 4.7 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan jenis lantai rumah. Rumah tangga miskin dengan jenis lantai terluas adalah semen/bata merah menempati urutan pertama, yaitu sebesar 49,89 persen, kemudian disusul dengan lantai kayu/papan 28,82 persen.

4.3 KARAKTERISTIK SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adalah status pekerjaan kepala rumah tangga. Bekerja dalam konsep Badan Pusat Statistik adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Gambar 4.8 memperlihatkan persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja sebanyak 84,79 persen. Sumber perekonomian rumah tangga yang ditopang oleh kepala rumah tangga akan sangat bergantung dengan pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan tidak selalu berarti rumah tangga tersebut akan lepas dari kemiskinan, jika pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan, maka rumah tangga tersebut masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Gambar 4.8. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020



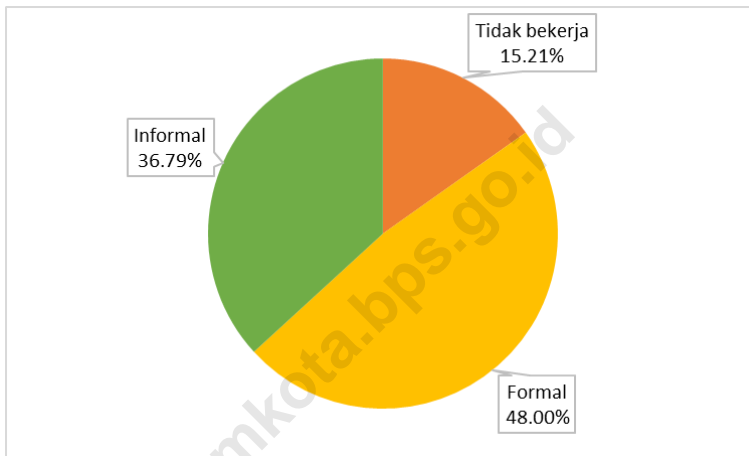
Sumber: Susenas Maret 2020

Distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga disajikan pada Gambar 4.9. Status pekerjaan utama dibedakan dalam dua kategori, yaitu, formal dan informal. Terdapat tujuh status pekerjaan yang dikumpulkan dalam Susenas 2020 ini, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di sector pertanian, pekerja di non pertanian dan pekerja tidak di bayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Sedangkan sisanya termasuk pekerja informal.

Dari Gambar 4.9 terlihat bahwa untuk kepala rumah tangga miskin yang bekerja, sebanyak 36,790 persen adalah pekerja informal. Pekerja informal adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan sebagian besar rumah tangga miskin sangat rendah.

Sehingga sektor informal menjadi salah satu pilihan dari rumah tangga miskin untuk dapat tetap bekerja.

Gambar 4.9. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian sebesar 31,80 persen, sektor industri 33,95 persen. Sektor industri merupakan sektor yang membutuhkan ketrampilan dan pendidikan yang memadai.

Tabel 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin Kota Batam menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2020

<i>Jenis Lapangan Usaha</i>	<i>Rumah Tangga Miskin (%)</i>
(1)	(2)
Pertanian	31.80
Industri	33.95
Lainnya	34.25

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa kepala rumah tangga laki-laki, memiliki akses yang cukup tinggi untuk dapat bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 33,63 persen. Sedangkan lapangan usaha industri dan lainnya, kepala rumah tangga perempuan memiliki presentase lebih tinggi.

Tabel 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, Maret 2020

<i>Jenis Lapangan Usaha</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Pertanian</i>	33.63	6.81	31.80
<i>Industri</i>	33.03	46.43	33.95
<i>Lainnya</i>	33.33	46.76	34.25
<i>Total</i>	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas Maret 2020

4.4 KARAKTERISTIK SOSIAL PENDIDIKAN

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Dalam berbagai penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan didapatkan hasil bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Secara tidak langsung, pendidikan yang tinggi akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji/pendapatan yang layak. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan melalui pendidikan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan.

Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah persentase kepala rumah tangga miskin menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kepala rumah tangga adalah seseorang yang bertanggung jawab secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya, sehingga

pendidikan kepala rumah tangga akan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rumah tangganya.

Tabel 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, Maret 2020

<i>Pendidikan Tertinggi</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Tidak Punya Ijazah</i>	19.74	57.31	23.57
<i>SD</i>	37.17	22.58	35.68
<i>SLTP</i>	11.46	10.16	11.33
<i>SLTA</i>	30.16	9.95	28.10
<i>Perguruan Tinggi</i>	1.47	0.00	1.32
<i>Total</i>	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas Maret 2020

Berdasarkan Tabel 4.5, secara umum dapat dilihat bahwa pada rumah tangga miskin tingkat pendidikan kepala rumah tangga laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga miskin perempuan. Bahkan jika dilihat persentase kepala rumah tangga miskin yang berjenis kelamin perempuan yang tidak tidak tamat SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 57,31 persen dibanding 19,74.

5 PENUTUP



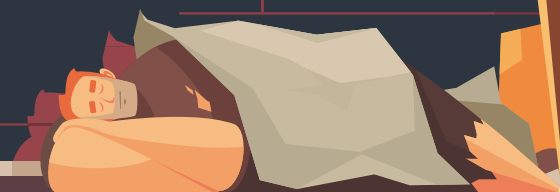
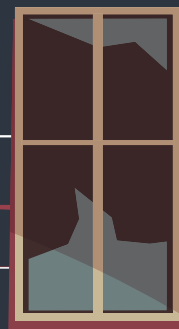
BAB V

PENUTUP

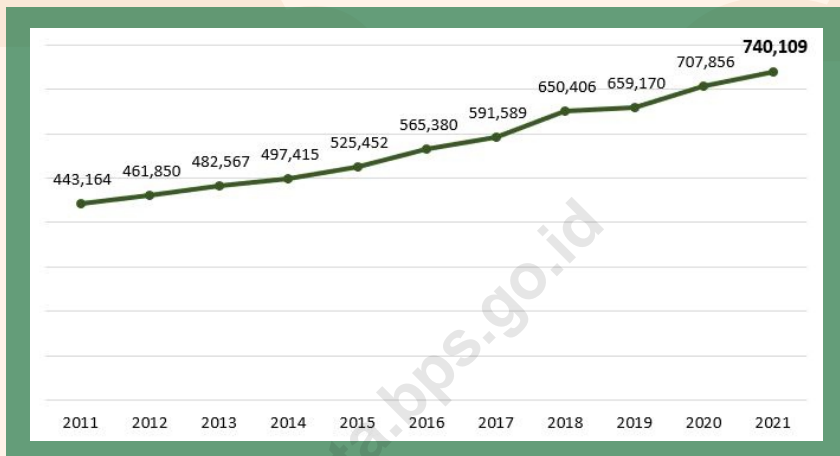
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Semoga publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kota Batam dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dan pihak lainnya untuk merumuskan solusi dalam pengentasan kemiskinan.

INFOGRAFIS



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN, KOTA BATAM TAHUN 2021



Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Batam, Maret 2011-Maret 2021

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara **2100 kilokalori** per kapita perhari & kebutuhan pokok bukan makanan.



KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2020



Rata-rata Umur KRT (tahun)

46,88 Laki-laki
60,79 Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah KRT (tahun)

8,40 Laki-laki
5,06 Perempuan



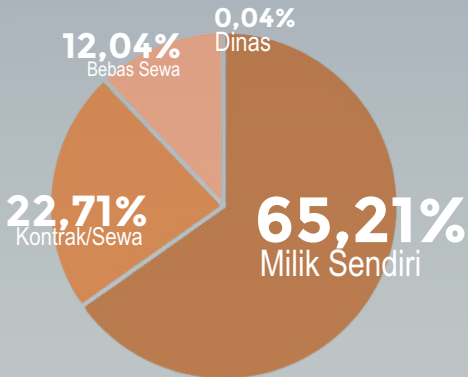
Jenis Kelamin KRT:

88,01% Laki-laki
11,99% Perempuan



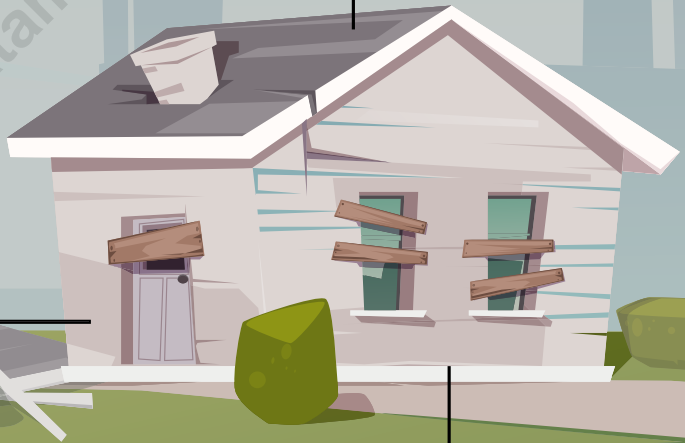
Sumber: BPS,
Survei Sosial Ekonomi Nasional
Maret 2020

KARAKTERISTIK TEMPAT TINGGAL (PERUMAHAN) RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2020



Status Kepemilikan
Tempat Tinggal

Jenis Atap
55,89%
Asbes

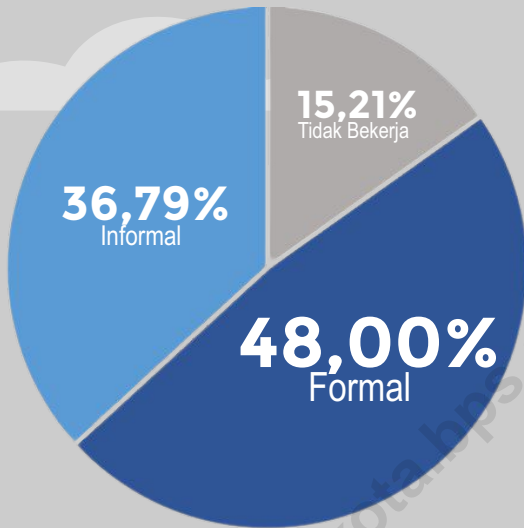


Jenis Dinding
57,65%
Tembok

Luas Lantai
40,32%
8m² < luas <= 15m²

Jenis Lantai
49,89%
Semen/bata merah

KARAKTERISTIK SOSIAL KETENAGAKERJAAN RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2020



Status Pekerjaan Utama
Kepala Rumah Tangga

Lapangan Usaha Pekerjaan Utama KRT



31,80%
Pertanian



33,95%
Industri

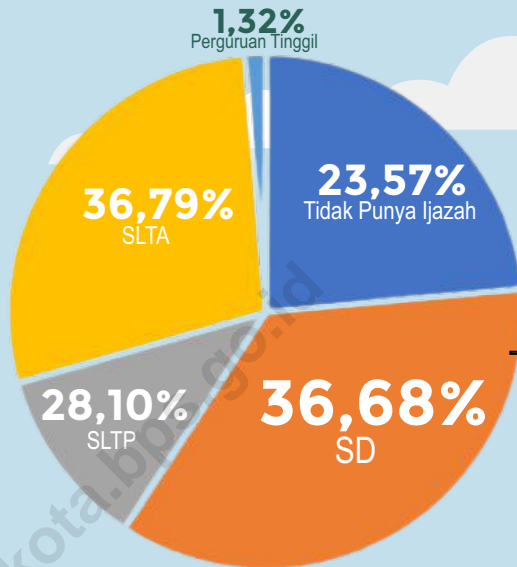


34,25%
Lainnya

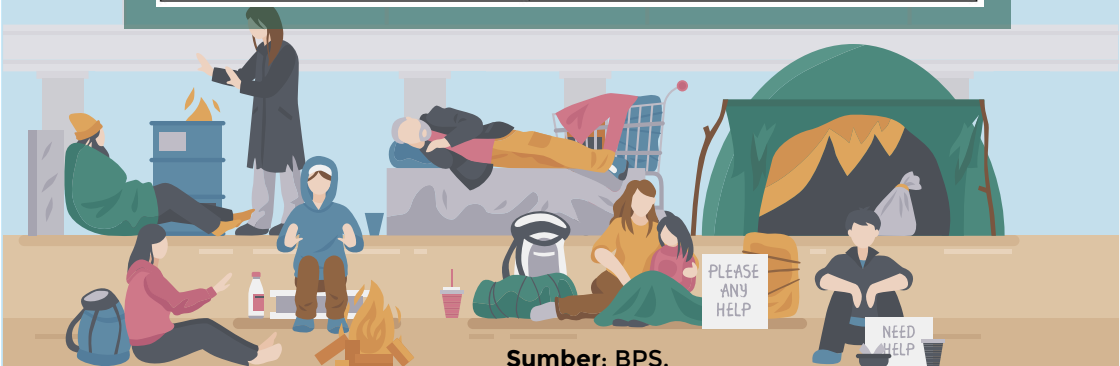


KARAKTERISTIK SOSIAL KEPENDIDIKAN RUMAH TANGGA MISKIN, KOTA BATAM TAHUN 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT



Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah			
SD	37.17	22.58	35.68
SLTP	11.46	10.16	11.33
SLTA	30.16	9.95	28.10
Perguruan Tinggi			
1.47	0.00	1.32	
Total	100.00	100.00	100.00



Sumber: BPS,
Survei Sosial Ekonomi Nasional
Maret 2020



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM**

Jl. Raja Ali Kelana - Batam Center - Kota Batam
Telp. (0778) 7433299 | Fax. (0778) 7433299
Email: bps2171@bps.go.id
Website: <https://batamkota.bps.go.id>

ISBN 978-623-7857-38-9 (PDF)



9 786237 857389